

SINERGI DESA ADAT DAN DESA DINAS DALAM PENCEGAHAN DAN UPAYA PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI BALI

I Wayan Wahyu Wira Udytama¹⁾, I Nengah Susrama²⁾

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: wira.udytamafh@unmas.ac.id

ABSTRAK

Bali sebagai barometer pariwisata dunia tetap menawarkan daya tarik yang luar biasa kepada masyarakat dunia untuk menikmati pesona pariwisata Bali yang bernafaskan pada budaya dan kearifan lokal Bali, dengan adanya pandemi COVID-19 yang mewabah melanda seluruh belahan dunia termasuk juga Bali, membuat segala pihak di Bali berperan aktif dalam mencegah dan menangani pandemi COVID-19 di Bali, desa adat dan desa dinas di Bali merupakan ujung tombak sistem pemerintahan di Bali yang memiliki peranan penting untuk menjaga stabilitas masyarakat di Bali, permasalahan yang muncul pada saat ini di Bali adalah seperti apa sinergi desa adat dan desa dinas di Bali dalam mencegah dan mempercepat penanganan COVID-19 di Bali serta kendala yang masih dihadapi oleh desa adat dan desa dinas untuk masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang menitik beratkan pada pendekatan fakta hukum di masyarakat terkait dengan sinergi desa adat dan desa dinas di Bali dalam upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 di Bali, sehingga dalam penelitian ini didapatkan bahwa desa adat dan desa dinas di Bali memiliki peranan masing-masing dalam upaya pencegahan dan upaya percepatan penanganan COVID-19 di Bali, masing-masing memiliki regulasi yang saling mendukung antara desa adat dan desa dinas untuk menjadikan Bali bersih dari pandemi COVID-19, sehingga peran serta masyarakat juga sangat penting dalam mensukseskan upaya desa adat dan desa dinas guna mendukung upaya yang dilakukan oleh desa adat dan desa dinas di Bali.

Kata Kunci : *dualisme desa di Bali, upaya penanganan COVID-19, desa adat dan desa dinas di Bali.*

ABSTRACT

Bali as a world tourism barometer still offers extraordinary appeal to the people of the world to enjoy the charm of Bali tourism which breathes into Balinese culture and local wisdom, with the COVID-19 pandemic which plagues all parts of the world including Bali, making all parties in Bali play an active role in preventing and dealing with the COVID-19 pandemic in Bali, traditional villages and official villages in Bali are the spearhead of the government system in Bali that has an important role to maintain the stability of the community in Bali, the problems that arise at this time in Bali are what is the synergy of indigenous villages and official villages in Bali in preventing and accelerating the handling of COVID-19 in Bali as well as the obstacles that are still faced by traditional villages and official villages for this problem, this study uses an empirical juridical method that focuses on the approach of legal facts in the community related to the synergy of indigenous villages and official village in Bali in prevention efforts and COVID-19 in Bali, so that in this study it was found that the traditional villages and the official village of Bali had their respective roles in

the prevention and acceleration of the response to Covid 19 in Bali, each of which had mutually supportive regulations between the customary and official villages to make bali is clean from the covid pandemic 19, so that community participation is also very important in the success of the efforts of adat villages and dinas villages to support efforts made by adat villages and dinas villages in Bali.

Keywords: *dualism villages in bali, efforts to deal with covid 19, traditional villages and service villages in bali*

1. Pendahuluan.

Bali merupakan salah satu destinasi pariwisata primadona dunia, yang menjadi barometer tingkat keamanan pariwisata di Indonesia, pariwisata di Bali memiliki daya tarik yang luar biasa pada masyarakat dunia, ketertarikan masyarakat dunia terhadap pariwisata Bali tidak lain dan tidak bukan karena pariwisata Bali bernafaskan pada budaya dan kearifan lokal Bali, hal ini terjadi berkat partisipasi aktif dari pemerintah dan masyarakat Bali guna mendukung kemajuan pariwisata Bali yang bernafaskan pada budaya dan kearifan lokal Bali.

Kedua dunia saat ini tengah dilanda wabah pandemi covid 19, tak luput juga di Bali yang saat ini terdampak pada covid 19 yang sedang menjadi permasalahan besar bagi seluruh dunia untuk segera menanggulangi dan menyelesaikan wabah covid 19 ini, Indonesia tengah mempersiapkan strategi untuk memutus mata rantai penyebaran covid 19 yang diikuti oleh segenap pemerintah daerah di wilayah Indonesia.

Bali memiliki dualisme sistem pemerintahan desa, ada disebutkan sebagai desa dinas sebagai desa administratif yang mengurus segala kegiatan administratif pemerintahan tingkat terendah dalam sistem pemerintahan di Indonesia, dan adapula disebut sebagai desa adat atau dalam beberapa waktu yang lalu disebut sebagai desa pakraman di Bali, yang mana desa adat memiliki fungsi untuk menjaga

kestabilan kehidupan masyarakat dengan Tuhan, masyarakat dengan lingkungan dan antar masyarakat yang di Bali dikenal dengan konsep Tri Hita Karana, dimana dalam konsep tersebut memiliki filosofi yang luar biasa untuk menciptakan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat Bali. Adanya dua bentuk sistem Desa di Bali memperlihatkan suatu fenomena dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Desa Adat sebagai Desa tradisional dengan kepemimpinannya memiliki pengaruh yang kuat bagi krama / warganya. Kuatnya institusi adat dari aspek sosiologis terkait erat dengan dukungan warga adat terhadap institusi tersebut. Kepatuhan warga terhadap Desa Adat membuat partisipasi masyarakat dalam kegiatan kegiatan Desanya (terutama kegiatan adat) sangat besar. Berbeda halnya dengan Pemerintahan Desa Dinas dari aspek sosiologis lebih lemah, namun memiliki tugas dan wewenang secara formal.

Istilah Tri Hita Karana muncul pada tahun 1969, dalam seminar tentang desa adat. Pada kesempatan itu (Kaler, 1969 dalam Wiana, 2004 : 265) mengimplentasikan Tri Hita Karana dalam wujud tata ruang, dan tata aktivitas dalam desa adat. Unsur-unsurnya disebutkan meliputi Parhyangan (hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa), Pawongan (hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia), dan Palemahan (Hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam lingkungan). Meskipun konsep THK pada

dasarnya adalah sebuah landasan yang bersumber dari agama Hindu, sejatinya THK adalah konsep universal yang ada pada semua ajaran agama di dunia (Windia dan Dewi, 2011).

Dengan adanya dualisme sistem pemerintahan desa di Bali, sistem yang terjalin diantara keduanya bukan saling melemahkan melainkan saling mendukung anantara satu dengan yang lainnya guna mencapai tujuan yang diharapkan bersama, yakni kesejahteraan dan kenyamanan untuk seluruh masyarakat Bali. Begitu pula dengan permasalahan Covid-19 ini dimana Desa Adat dan Desa Dinas di Bali saling bekerjasama dan saling mendukung dalam upaya percepatan penanganan covid -19 di Bali.

2. Metode Penelitian

Penelitian dengan judul sinergi Desa Adat dan Desa Dinas Di Bali Dalam Pencegahan dan Upaya Percepatan Penanganan Covid-19 ini Menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris atau yang biasa diistilahkan dengan penelitian lapangan yaitu, mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat (Bambang Waluyo:2002:15). Atau dalam kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dalam masyarakat dengan maksud menemukan dan mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian kemudian berlanjut kepada identifikasi masalah penelitian dan mampu menemukan penyelesaian masalah (Bambang Waluyo:2002:16)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai intitusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata (Soerjono Soekanto:1986:51).

3. Pembahasan

Strategi Desa Adat dan Desa Dinas Di Bali Dalam Upaya Percepatan Penanganan Covid-19

Wabah pandemic covid-19 ini memerlukan partisipasi dari segala unsur masyarakat bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun lebih dari itu, partisipasi peran serta masyarakat juga sangat berperan penting untuk percepatan penanganan covid-19 ini. Bali memiliki dua sistem pemerintahan yang memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda, dimana terdapat sistem pemerintahan dinas dengan sistem pemerintahan adat, walaupun kedua sistem pemerintahan tersebut memiliki perbedaan tugas yang mencolok sesuai dengan karakter pemerintahan masing masing tapi kedua sistem tersebut memiliki peran penting dalam percepatan penanganan covid-19, dimana keduanya saling bekerjasama dan saling mengisi dalam upaya percepatan penanganan dan pemulihan covid-19 di Bali.

Kerjasama Desa Adat dengan Desa Dinas dalam rangka percepatan penanggulangan dan pemulihan covid-19 di Bali tercermin dalam regulasi regulasi yang dikeluarkan oleh gubernur Bali terkait percepatan penanganan covid-19 di Bali. Bentuk sinergi antara Desa Dinas dengan Desa Adat di Bali dalam upaya percepatan penanggulangan Covid-19 terlihat dalam Regulasi yang diturunkan oleh Pemerintah Daerah tentang tata cara penanggulangan covid 19 di bali diteruskan kembali oleh desa adat yang menguatkan kembali regulasi tersebut dengan melibatkan personil desa adat dalam hal ini krama desa adat, pecalang, dan prajuru desa adat, bukan hanya melibatkan perangkat desa adat, tapi perangkat aparatur desa dinas di bali juga ikut terlibat seperti jajaran kepala

desa/lurah, kecamatan dan kelian dinas di masing masing banjar dinas di bali.

Pelaksanaan penjagaan di pintu masuk atau perbatasan masing masing wilayah selain melibatkan aparatur pemerintah dinas terkait seperti Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan/Puskesmas, dan kepolisian, juga melibatkan anggota satuan pengamanan Desa Adat di Bali yang biasa dikenal dengan nama Pecalang, penjagaan ini ditujukan agar memperkecil resiko penyebaran covid 19 di masing masing wilayah di Bali. penjagaan tersebut dilakukan dengan pemeriksaan protocol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah kepada masyarakat yang akan memasuki wilayah tertentu dengan hal hal yang diperiksa antara lain, pemeriksaan masker, pemeriksaan suhu tubuh, dan penyemprotan disinfektan pada kendaraan yang akan memasuki wilayahnya, yang pengecekan dilakukan secara kerjasama antara aparat pemerintah dengan Desa Adat di Bali.

Kendala Yang Dihadapi Desa Adat dan Desa Dinas Di Bali Dalam Upaya Percepatan Penanganan Covid-19

Sinergi Desa Dinas dengan Desa Adat di Bali dalam rangka percepatan penanggulangan covid 19 dapat dikatakan berjalan dengan baik, namun masih terbentur beberapa kendala dalam pelaksanaannya, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tersebut antara lain berasal dari internal dan eksternal dari masing masing pihak, diantaranya kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan percepatan penanganan covid-19 ini masih terbentur pada anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan percepatan penanggulangan covid-19 ini. Kegiatan Percepatan penanganan Covid-19 ini memerlukan biaya yang sangat besar yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah untuk

mendukung ketersediaan sarana prasarana pendukung kegiatan tersebut, serta terbatasnya SDM yang dilibatkan untuk melakukan penjagaan pada masing masing perbatasan wilayah di Bali. Dalam hal regulasi juga masih menemukan kendala seperti belum jelasnya pembagian kerja antara pemerintah dengan desa adat dalam hal percepatan penanganan covid-19 di bali, walaupun secara prinsip sinergi desa adat dengan desa dinas dilakukan secara gotong royong dan kerjasama rakyat dalam upaya penanganan covid 19 ini.

Dari pihak desa adat masih terkendala kebutuhan peralatan yang diperlukan dalam upaya penanganan covid-19 ini, seperti ketersediaan cairan disinfektan, masker dan alat peraga sosialisasi (poster) dalam rangka percepatan penanganan covid-19, walaupun di beberapa desa adat sudah melaksanakan sosialisasi dengan Menggunakan alat pengeras suara yang terpasang pada wantilan Desa Adat masing masing tentang bahaya covid-19 dan cara mengantisipasi penyebaran covid-19.

4. Kesimpulan

Bentuk sinergi Desa Adat dengan Desa Dinas di Bali dalam upaya percepatan penanggulangan Covid-19 ini tercermin dalam penerbitan regulasi oleh pemerintah daerah di Bali yang diturunkan kembali oleh Desa Adat di Bali terkait percepatan penanganan covid-19, serta kerjasama antara pemerintah dengan desa adat dalam hal penjagaan wilayah di Bali terkait dengan upaya pencegahan penyebaran covid-19 di Bali.

Desa Adat dengan Desa Dinas dalam upaya percepatan penanganan covid-19 di Bali masih menemukan kendala dalam pelaksanaannya antara lain terkendala dalam hal Anggaran, SDM dan Sarana Prasarana Penunjang Upaya Percepatan Penanganan Covid-19 di Bali.

Daftar Pustaka

Soekanto, Soerjono 1986, Pengantar Penelitian Hukum, universitas Indonesia press, Jakarta.

Waluyo, Bambang 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, sinar grafika, Jakarta

Wiana, I Ketut, 2007. Tri Hita Karana Menuntut Konsep Hindu. Surabaya: Paramita